



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 166 -Bag Orgs/2026

TENTANG
SINGKATAN DAN AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta keseragaman dalam penggunaan singkatan dan akronim nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian terhadap singkatan dan akronim yang digunakan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu menyesuaikan Singkatan dan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Singkatan dan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Singkatan dan akronim nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Singkatan dan akronim nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk penulisan dalam surat-menyurat dan stempel Perangkat Daerah.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep.366 Bag.Orgs/2021 tentang Penetapan Penamaan Singkatan dan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 166 -Bag Orgs/2026
TENTANG
SINGKATAN DAN AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SINGKATAN DAN AKRONIOM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SINGKATAN DAN AKRONIM
1	Sekretariat Daerah	Setda
	- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Aspemkesra
	- Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asekbang
	- Asisten Administrasi Umum	Asdum
	- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Sahlipemhukpol
	- Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sahlipembekkeu
	- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sahlikemas SDM
	- Bagian Tata Pemerintahan	Bagtapem
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	Bagkesra
	- Bagian Hukum	Baghuk
	- Bagian Perekonomian	Bageko
	- Bagian Administrasi Pembangunan	Bagadbang
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagpebarjas
	- Bagian Umum	Bagum

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SINGKATAN DAN AKRONIM
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagprokompim
	- Bagian Organisasi	Bagor
	- Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagperkeu
2	Sekretariat DPRD	Setwan
3	Inspektorat Daerah	Itda
4	Dinas Pendidikan	Disdik
5	Dinas Kesehatan	Dinkes
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPUTR
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperkim
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
9	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Disdamkarmat
10	Dinas Sosial	Dinsos
11	Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DKPP
14	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
17	Dinas Perhubungan	Dishub
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Diskominfosantik

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SINGKATAN DAN AKRONIM
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
20	Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Diskop UMKM
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora
23	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Disparekrafbud
24	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dispernakan
25	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Disarpus
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BKAD
28	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
32	Kecamatan Lembang	Kec. Lembang
33	Kecamatan Parongpong	Kec. Parongpong
34	Kecamatan Cisarua	Kec. Cisarua
35	Kecamatan Cikalongwetan	Kec. Cikalongwetan
36	Kecamatan Cipeundeuy	Kec. Cipeundeuy
37	Kecamatan Ngamprah	Kec. Ngamprah
38	Kecamatan Cipatat	Kec. Cipatat
39	Kecamatan Padalarang	Kec. Padalarang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	SINGKATAN DAN AKRONIM
40	Kecamatan Batujajar	Kec. Batujajar
41	Kecamatan Cihampelas	Kec. Cihampelas
42	Kecamatan Cililin	Kec. Cililin
43	Kecamatan Cipongkor	Kec. Cipongkor
44	Kecamatan Rongga	Kec. Rongga
45	Kecamatan Sindangkerta	Kec. Sindangkerta
46	Kecamatan Gununghalu	Kec. Gununghalu
47	Kecamatan Saguling	Kec. Saguling

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL